

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aris S Hutagalung, *Tebaran Pemikiran seputar masalah hukum tanah*, Cet.1, Jakarta, Lembaga Pemberdaya Hukum Indonesia, 2005.

Andrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, 2007.

Prof. R. Subekti, S.H dan R.Tjitrosudibio, *Tentang Pembuktian dan Tulisan*, Cet. 39, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986.

W.Friedmann, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.

J.J.M. Wuisman, Penyunting M. Hisman, *Penelitian ilmu-ilmu sosial*, Jilid 1, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994.

HR.Otje Salman S dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2005.

Snelbecker dalam Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika Edisi Kedua, 2006.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, 1982

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1988.

Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-hak atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006.

Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2006.

G.Kartasapoetra dkk, *Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1985

Urip Santoso. *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah*. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 1, 2012

Prof.R.Subekti,S.H dan R.Tjitrosudibio, *Tentang pembuktian dengan tulisan*, Cet 39, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

M. Marwan & jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan Kesatu, Reality Pulisher, Jakarta, 2009.

I Ketutu Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1984.

Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Rafika, 2007.

Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang, Setara Press, 2016.

Paul S.Baut dan Beny Harman K., *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan LBHI, 1988.

Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

M.Solly Lubis, *Sistem Nasional*, Bandung, Bandar Maju, 2002.

Badan Pertanahan Nasional, *Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah*, Jakarta, Bumi Bhakti Adhi Guna, 1993.

A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Maju Bandar, 1999.

Imam Soetikno, *Proses Terjadinya UUPA*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1987.

Adrian Sutedi, *Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta berbagai Permasalahannya*, Jakarta, Cipta Jaya, 2006.

Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-hak atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

John Salindheo, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cet.2, JSinar Grafika, Jakarta, 1988.

Prof.R.Subekti,S.H dan R.Tjitrosudibio, *Tentang pembuktian dengan tulisan*, Cet 39, Jakarta : Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990.

S.Chandra, *Sertipikat Kepemilikan Hak atas Tanah, Persyaratan di Kantor Pertanahan*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan penjelasan, jilid 1 Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960.

Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ("Permenag Nomor : 3/1997").

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi.

Peraturan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah tertentu, yang merubah sebagian isi dari Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 1999.

Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2006 tentang Pengertian Musyawarah.

Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (6) tentang pengadaan tanah dilakukan melalui pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sah perjanjian.

Pasal 1868 KUHPer tentang Dasar Hukum Akta Otentik.

Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 1321 KUHPer tentang Hal yang meyebabkan cacat hukum suatu kesepakatan.

Pasal 1323 dan 1324 KUHPer tentang Pengertian Paksaan.

C. INTERNET.

<https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/letter-c/>

www.hukum.hukumonline.com,Lingkup kerja Notaris.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional

Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jurnal Hukum, Juli 2016.

Anang Ade Irawan, dkk, *Pertanggung jawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 No. 2 tahun 2018

Anonim,"Tujuan Pendaftaran Tanah", http://id.wikipedia.org/wiki/Pe penyelesaian_masalah.

www.hukumonline.com,peralihan hak atas tanah harus dihadapan PPAT.

**A. SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BEKASI.**

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Nomor : 00443/HGB/BPN-32.16/2021.